

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap desa memiliki potensi yang berbeda-beda. Beberapa pengembangan di desa pun sudah dilakukan. Dalam menggali potensi desa keberadaan dana desa dapat dikatakan sebagai fasilitator yang di dalamnya cukup berpengaruh secara signifikan pada perkembangan perekonomian desa mulai dari membiayai, memfasilitasi, dan membantu serta mengarahkan desa untuk menampilkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna kesejahteraan masyarakat yang ada di dalamnya. Mewujudkan desa mandiri telah menjadi tujuan pemerintah desa yang tentunya akan sejalan dengan visi dan misi yang ingin dicapai sehingga nilai Indeks Desa Membangun (IDM) semakin meningkat. Desa mandiri dapat diwujudkan dengan adanya kerjasama yang baik antara komponen desa termasuk partisipasi dari masyarakat.

Selama ini masyarakat desa dicirikan dengan kondisinya yang serba kurang dibandingkan dengan masyarakat perkotaan yang dapat dilihat dari segi ekonomi di mana masyarakat kota jauh lebih memiliki taraf hidup dan kualitas yang tinggi dibandingkan dengan masyarakat desa bahkan ditambah lagi dengan adanya sumber daya manusia yang kurang aktif dan minim partisipasi. Kegiatan desa yang kosong dan tidak produktif menyebabkan desa mengalami ketertinggalan. Jika dibiarkan secara terus-menerus maka yang akan terjadi adalah menurunnya kualitas

sumber daya manusia dan meningkatnya angka kemiskinan. Potensi sumber daya manusia di pedesaan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan, sehingga terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas dapat menjadi bekal dan penunjang kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya terlepas dari adanya segala kendala atau hambatan yang ada.

Pada periode 2020 Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan pada nilai penyeteroran dana desa. Sampai saat ini pemerintah masih tetap melakukan monitoring dalam upaya memajukan desa lewat kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat mengingat status desa berdasarkan dari data Kemendesa untuk nilai Indeks Desa Membangun karakteristik desa pada Kabupaten Tulungagung cenderung homogen berada pada status desa maju dan berkembang.² Dalam kalsifikasi desa menurut Indeks Desa Membangun, desa dengan kategori maju memiliki peluang untuk menuju mandiri namun konsep pembangunan suatu desa bukan hanya dirumuskan melalui kebijakan ekonomi saja, namun juga harus melibatkan aspek lainnya seperti sosial lingkungan yaitu adanya aspirasi masyarakat, eksistensi lembaga sosial. Aspek lingkungan juga perlu diperhatikan dalam rangka mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, meskipun demikian adanya implementasi dari kebijakan pembangunan ini tidak selalu berhasil karena masih terdapat permasalahan di dalamnya di mana terdapat fenomena kesenjangan, kemiskinan, kurang

² *Indeks Desa Membangun tahun 2020-2021* diakses melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan diakses melalui (<https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/3/publikasi>), pada tanggal 12 Februari 2023

tepatnya mengelola sumber daya dan lemahnya kelembagaan penduduk desa. Indeks Desa Membangun menempatkan kekuatan kapasitas masyarakat sebagai dasar utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan desa di mana indeks ini difokuskan pada upaya memperkuat otonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat.³ Berdasarkan urusan pembangunan daerah, Kabupaten Tulungagung memiliki berbagai permasalahan merujuk pada indikator Indeks Desa Membangun yaitu sebagai berikut:⁴

1. Indeks Ketahanan Sosial

a) Bidang Pendidikan

Permasalahan yang ada pada indikator ini adalah belum optimalnya peningkatan partisipasi sekolah, kurikulum pendidikan, kualitas tenaga pendidik, pengembangan sastra bahasa, dan pelayanan perijinan penyelenggaraan pendidikan.

b) Bidang kesehatan

Permasalahan yang ada pada indikator ini adalah belum memadainya SDM kesehatan, rendahnya cakupan rumah tangga sehat serta belum optimalnya pelayanan kesehatan terhadap pasien dengan penyakit yang cukup serius.

³ Ketut Sukiyono et.,al, *Jejak Desa Membangun 2015-2019*, Bengkulu: Copyright PUSDATIN BALILAFTO Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019, hal 41

⁴ Pemerintah Kabupaten Tulungagung, *Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019*

c) Bidang Modal Sosial

Permasalahan yang ada pada indikator ini adalah belum optimalnya pelayanan, pengelolaan dan fasilitas sosial serta masih banyaknya anak terlantar.

d) Bidang Pemukiman

Permasalahan yang ada pada indikator ini adalah kondisi sarana dan prasarana yang rusak bahkan tidak sesuai standar teknis serta masih terdapat rumah tidak layak huni.

2. Indeks Ketahanan Ekonomi

a) Keragaman Produksi Masyarakat

Permasalahan yang ada pada indikator ini adalah kurang optimalnya SDM yang dimiliki oleh masyarakat.

b) Akses Pusat Pelayanan Perdagangan

Permasalahan yang ada pada indikator ini adalah banyak pusat perdagangan dan jasa yang tidak menawarkan lahan parkir di luar jalan serta kurang adanya pelaku usaha yang siap bersaing dalam tingkat nasional.

c) Akses Distribusi dan Logistik

Permasalahan yang ada pada indikator ini adalah belum adanya fasilitas bongkar muat kendaraan barang.

d) Akses Perbankan dan Kredit

Permasalahan yang ada pada indikator ini adalah belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik di bidang penanaman modal dan tidak mudah berinvestasi di Kabupaten Tulungagung

e) Keterbukaan Wilayah

Permasalahan yang ada pada indikator ini adalah kebijakan penataan ruang belum optimal mendukung pengembangan wilayah.

3. Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan

a) Kualitas Lingkungan

Permasalahan yang ada pada indikator ini adalah menurunnya kualitas lingkungan hidup dan kualitas air serta udara karena banyak kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan.

b) Bencana Alam

Permasalahan yang ada pada indikator ini adalah belum optimalnya penataan sistem dasar terkait kebencanaan.

c) Tanggap Bencana

Permasalahan yang pada indikator ini adalah belum optimalnya kesiapsiagaan tanggap bencana, pelayanan informasi rawan bencana, pemanfaatan data base kebencanaan dan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta data kebencanaan belum terdokumentasi dengan baik.

Program Pemerintah Indonesia *Sustainable Development Goals* (SDG) menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia saat ini berkomitmen untuk melakukan pembangunan desa melalui belanja transfer dan dana desa. Dana ini diterima Pemerintah Desa dan ditunjuk sebagai Dana Pos dan Alokasi Desa dalam struktur APBDes. Transfer dari pusat maupun pemerintah daerah dapat digunakan sebagai upaya dalam melakukan pemulihan ekonomi sesuai kewenangan desa yaitu dengan mengembangkan dan meningkatkan kapasitas pengelolaan BUMDesa, pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama dan perbaikan konsolidasi data SDGs Desa serta pendataan perkembangan desa melalui IDM. Dana desa juga sah digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa yang sesuai dengan Kepmendesa PDTT Nomor 71 Tahun 2021 di mana musyawarah desa dapat menggali dana talangan sebelum dana desa bisa digunakan, agar warga yang terkena bencana segera tertangani.

Penggunaan dana desa tahun 2021 untuk pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) berpedoman pada Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 mengenai prioritas penggunaan DD Tahun 2021 diperlukan sinergi terbaik dari pihak-pihak yang terlibat. Dana desa yang diberikan pemerintah pusat telah dibuktikan dapat mendongkrak nilai Indeks Desa Membangun (IDM).⁵ Berdasarkan data dari

⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan

idm.kemendesa.go.id terlihat bahwa jumlah desa sangat tertinggal di Indonesia mengalami ketidakstabilan dari yang awalnya berkurang menjadi meningkat kembali.

Tahun 2020 jumlah desa sangat tertinggal sebanyak 2466 desa atau sebesar 3,53% meningkat menjadi 4985 atau sebesar 6,75% pada tahun 2021, sedangkan tahun 2022 jumlah desa sangat tertinggal menurun menjadi 4438 atau sebesar 5,99%. Kemudian untuk desa tertinggal terlihat mengalami penurunan dari tahun 2020 sebanyak 13961 desa tertinggal atau sebesar 19,96%, menjadi 12177 desa atau sebesar 16,49% pada tahun 2021 dan kembali menurun lagi pada tahun 2022 sebanyak 9234 atau sebesar 12,47%. Selanjutnya untuk desa berkembang pada tahun 2020 sebanyak 39866 desa atau sebesar 57,01% dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 38086 atau sebesar 51,57%, menurun kembali menjadi 33892 atau sebesar 45,77% pada tahun 2022.

Sementara itu, desa maju dan mandiri menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2020-2022. Desa maju pada tahun 2020 sebanyak 11899 desa atau sebesar 17,01% menjadi 15324 desa atau sebesar 20,75% tahun 2021 dan meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 20248 atau sebesar 27,34%. Demikian juga pada desa mandiri pada tahun 2020 sebanyak 1741 desa atau sebesar 2,49% meningkat pada tahun 2021 menjadi 3728 desa atau sebesar 4,44% yang kemudian

meningkat lagi menjadi 6239 atau sebesar 8,43% pada tahun 2022.⁶ Dalam lingkup kabupaten Tulungagung data pada tahun 2021 Kabupaten Tulungagung termasuk ke dalam kategori maju dalam IDM dengan nilai rata-rata sebesar 0,7099 dengan desa mandiri sebanyak 6 desa, desa maju sebanyak 108 desa, dan desa berkembang sebanyak 143 desa serta tidak terdapat desa tertinggal ataupun desa sangat tertinggal.⁷

Tabel 1.1 Status Desa (IDM) di Kabupaten Tulungagung 2020-2022

Status	Jumlah 2020	(%) 2020	Jumlah 2021	(%) 2021	Jumlah 2022	(%) 2022
Desa Sangat Tertinggal	0	0%	0	0%	2	0%
Desa Tertinggal	0	0%	0	0%	0	0%
Desa Berkembang	178	69,26%	147	57,20%	51	18,8%
Desa Maju	75	29,18%	104	40,4%	149	55%
Desa Mandiri	4	1,56%	6	2,33%	60	22,14%

Sumber : DPMD Kab. Tulungagung tahun 2021 diolah

Berdasarkan informasi di atas, hal ini terbukti pada tahun 2021 ada enam desa mandiri di Kabupaten Tulungagung sedangkan tahun 2020 total ada 4 desa mandiri, berarti ada peningkatan dari sebelumnya 2 desa

⁶ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023

⁷ E-book Peringkat Indeks Desa Membangun Tahun 2021

berada pada tingkat desa maju, yaitu Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu dan Desa Karangtalun di kecamatan Kalidawir. Nilai-nilai yang mendukung Desa Sobontoro Indeks Ketahanan Sosial (IKS) naik dari 0,7279 menjadi 0,9086. Hal ini disebabkan meningkatnya ketersediaan daya RKPD Kabupaten Tulungagung. Tenaga kesehatan seperti bidan, dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Selain itu, Solidaritas sosial meningkat melalui dukungan gotong royong dan kegiatan olahraga. Toleransi didorong oleh keragaman suku/etnis yang berkembang di desa dan mayoritas agama.

Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) naik sebesar 0,1 dari 0,7167 menjadi 0,8167. Keanekaragaman produksi masyarakat desa meningkat dan adanya pasar desa adalah faktor yang meningkat dalam peningkatan Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE). Indeks Ketahanan Ekologis (IKL) mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 0,2% dari 0,6667 menjadi 0,8667 yang terjadi karena didukung oleh upaya dan inisiatif terkait dengan potensi bencana alam atau desa akan lebih tanggap bencana, walaupun upaya masih dapat dilakukan dalam dimensi ini.

Pertumbuhan Desa Karangtalun di Kecamatan Kalidawir terlihat berkembang dari desa maju menjadi desa Mandiri. Nilai Indeks Desa Membangun pada tahun 2020 sebesar 0,7489 naik menjadi 0,8303 pada tahun 2021. Hal ini didukung oleh kenaikan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) yang naik sebesar 0,1943 dari 0,6800 menjadi 0,8743. Itu disebabkan meningkatnya ketersediaan tenaga kesehatan seperti bidan,

dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Adanya akses SMA/SMK/MA < 6 km, pembukaan ruang publik, kegiatan olahraga juga meningkat. Toleransi ditandai meningkatnya keragaman suku/etnis di desa dan bahasa sehari-hari masyarakat desa.

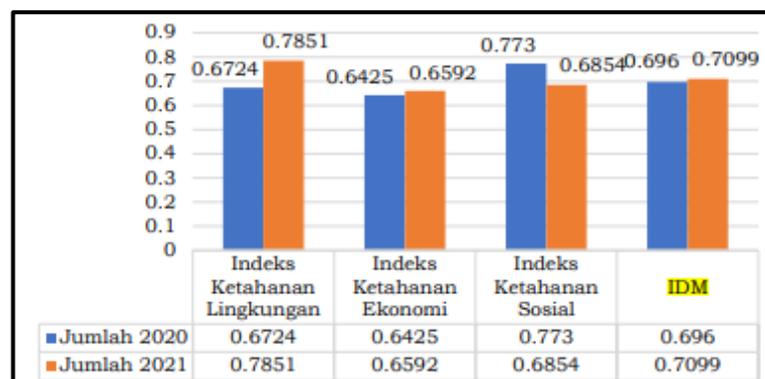
Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) naik sebesar 0,1166 menjadi dari 0,7667 menjadi sebesar 0,8833. Peningkatan indeks keberlanjutan ekonomi (IKE) karena ketersediaan distribusi logistik meningkat yaitu adanya Pos dan layanan logistik. Indeks Ketahanan Ekologis (IKL) turun, tapi tidak signifikan yaitu 0,0667 hingga 0,7333. Angka tersebut tidak mempengaruhi IDM karena disebabkan oleh pertumbuhan IKS dan IKE yang cukup signifikan.

Pada tahun 2022 jumlah desa mandiri meningkat sebesar menjadi 22% yaitu sebanyak 60 desa, diikuti oleh jumlah desa maju yang juga meningkat sebesar 55% yaitu sebanyak 149 desa. Jumlah desa berkembang yang menurun menjadi sebesar 18,8% yaitu sebanyak 51 desa, artinya terdapat 96 desa yang baeralih status menjadi lebih baik, sedangkan desa tertinggal masih tetap pada angka 0% atau tidak ada desa dengan status tersebut, kemudian desa sangat tertinggal yang awalnya pada tahun 2020 dan 2021 tidak ada justru meningkat menjadi sebanyak 2 desa pada tahun 2022.

Pengelompokan desa juga didasarkan pada Indeks Pembangunan Desa bertujuan untuk memperkuat sumber daya untuk memfasilitasi dukungan pembangunan desa menuju desa mandiri. Pengembangan

keterampilan di desa-desa dan khususnya desa-desa maju mengelola keberlanjutan daya secara sosial, ekonomi dan lingkungan pembangunan berkelanjutan menjadikannya desa mandiri. Indeks Desa Membangun di Kabupaten Tulungagung tahun 2021 sebesar 0,7099 ditunjukkan pada grafik di bawah ini:

Grafik 1. Indeks Desa Membangun Kab. Tulungagung 2020-2021



Sumber: DPMD Kab. Tulungagung tahun 2021

Berdasarkan informasi di atas, dapat dilihat bahwa IDM (Indeks Desa Membangun) di Kabupaten Tulungagung meningkat sebesar 0,0139. Pertumbuhan IDM diukur dengan tiga indikator atau indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Ekologis (IKL). Diukur berdasarkan indikator Indeks Ketahanan Sosial (IKS) terjadi penurunan sebesar 0,0876. Pertumbuhan didukung oleh partisipasi masyarakat untuk mengembangkan lembaga masyarakat, antara lain melalui PKK, adanya konvergensi stunting, forum anak, program dan dukungan perlindungan anak serta fasilitas posyandu. Indikator Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) terlihat meningkat sebesar 0,0167. Kenaikan IKE didukung oleh faktor pembangunan ekonomi desa, lembaga

BUMDes, Unit Usaha Ekonomi kemasyarakatan desa dan pengembangan kerjasama antar desa. Kemudian Indikator Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) meningkat sebesar 0,1124. Peningkatan IKL dibantu oleh beberapa faktor mediasi melalui sumber daya alam dan teknologi tepat guna (TTG), desa wisata dan penguatan pos pelayanan teknologi (POSYANTEK). Status IDM Kabupaten Tulungagung telah berubah dari Kabupaten berkembang menjadi Kabupaten maju pada tahun 2021.

Selain adanya dana desa sebagai pendanaan, belanja pemerintah Kabupaten Tulungagung juga bersumber pada alokasi dana desa. Alokasi dana desa memiliki tujuan untuk memberikan tanda terkait kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi dana desa merupakan penerimaan transfer yang di dalamnya memiliki porsi yang cukup besar dalam struktur APBDes. Hal ini menjadi alasan bahwa alokasi dana desa juga mendapat bagian dalam pendanaan desa. Dampak dari adanya kebijakan transfer ke desa dapat diukur menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM). Melalui dana desa dan alokasi dana desa peningkatan kapasitas fiskal tidak selalu berjalan selaras dengan perbaikan IDM yang dapat dilihat pada segala permasalahan pada setiap indikator-indikator IDM mulai dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Sejalan dengan hal tersebut dana desa yang ada di Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar Rp234.112.526.099 dengan total alokasi dana desa sebesar

Rp125.675.530.380 menjadi Rp237.606.485.000 untuk dana desa dan Rp116.779.400.000 untuk alokasi dana desa pada tahun 2021⁸, sedangkan pada tahun 2022 meningkat lagi untuk dana desa menjadi Rp243.944.292.000 dan alokasi dana desa sebesar Rp478.995.255.948 di mana hal ini menjadikan alokasi dana desa semakin berperan dalam pembiayaan-pembiayaan yang ada di Kabupaten Tulungagung.⁹ Sebagai bahan untuk memperkuat pembangunan desa sumber pendanaan lain juga memiliki hubungan dengan penyertaan modal, sumber dana tersebut adalah Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berdasarkan website Anggaran Desa di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2020 sampai dengan 2022 hampir semua desa mampu menyalurkan PADesa, namun hanya terdapat beberapa desa yang mempublikasikan PADesanya.¹⁰ Semakin besar Pendapatan Asli Desa (PADes) maka tingkat ketergantungan pemerintah desa terhadap pendapatan transfer sebagai sumber pendanaan belanja pemerintah desa akan semakin berkurang. Dari ketiga sumber pendanaan untuk desa yaitu dana desa, alokasi dana desa, dan PADesa dapat digunakan untuk memajukan serta mendorong pembangunan desa sehingga nilai Indeks Desa Membangun juga ikut meningkat.

Keberhasilan pembangunan desa dapat diukur menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) yang di dalamnya terdapat lima

⁸ Perbup Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum dan Rincian ADD Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019

⁹ Data Kemendesa, *Dana Desa tahun 2022*, diakses melalui (sid.kemendesa.go.id/idm), pada tanggal 12 Maret 2023

¹⁰ BPS Kabupaten Tulungagung, *Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Jenis dan Tahun Anggaran di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017-2020, 2021*

pengkalsifikasian desa yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal (Kemendes.go.id). Dalam Indeks Desa Membangun (IDM) memiliki indikator penting yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ekologi atau Lingkungan sehingga dalam penelitian ini akan menjawab apakah pembangunan dan kemajuan dari dana desa, alokasi dana desa, dan Pendapatan Asli Desa (PADes) dapat berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Desa Membangun mengingat bahwa penelitian yang dilakukan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, sebagai bagian dari belanja prioritas, perlu dilakukan uji dampak dan keberhasilan dari adanya ketiga variabel tersebut untuk menjelaskan seberapa besar pengaruhnya terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa khususnya terhadap Indeks Desa Membangun.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Dana Desa (DD) berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Tulungagung tahun 2020-2022?
2. Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Tulungagung tahun 2020-2022?
3. Apakah Pendapatan Asli Desa (PADes) berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Tulungagung tahun 2020-2022?

4. Apakah Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dapat berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Desa Membangun tahun di Kabupaten Tulungagung tahun 2020-2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh signifikan Dana Desa (DD) terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Tulungagung tahun 2020-2022.
2. Untuk menganalisis pengaruh signifikan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Tulungagung tahun 2020-2022.
3. Untuk menganalisis pengaruh signifikan Pendapatan Asli Desa (PADesa) terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Tulungagung tahun 2020-2022.
4. Untuk menganalisis pengaruh signifikan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Pendapatan Asli Desa (PADesa) terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Tulungagung tahun 2020-2022.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini akan bermanfaat bagi pembaca untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan terkait dengan

adanya pengaruh dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa terhadap Indeks Desa Membangun.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis akan bermanfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk mengetahui dampak adanya dana desa terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Tulungagung. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan referensi dan juga ilmu pengetahuan untuk merumuskan sebuah penelitian terkait dengan adanya pengaruh antara dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa terhadap Indeks Desa Membangun.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di 43 desa yang ada di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini dilakukan untuk menguji data Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa (PADesa) terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Tulungagung.

Peneliti memberikan pembatasan masalah terkait dengan variabel yang digunakan yaitu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa sebagai variabel independen dan Indeks Desa Membangun sebagai variabel dependen untuk menghindari meluasnya permasalahan. Penelitian ini dilakukan dengan data pada tahun 2020-2022 dan untuk data Indeks Desa membangun data penelitian yang diambil jumlah nilai pada tahun 2020-2022.

F. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

Secara konseptual, yang dimaksud dengan Pengaruh dari dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa terhadap Indeks Desa Membangun yaitu sebagai berikut:

a. Dana Desa sebagai X1

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Dana Desa (DD) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.¹¹

b. Alokasi Dana Desa sebagai X2

Alokasi dana desa adalah dana yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan program-program Pemerintahan Desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat setempat.¹² Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 pasal 19 tujuan alokasi dana desa untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan, meningkatkan perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan

¹¹ Sunarso, *Sosiologi Pembangunan Desa*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), hal 112

¹² Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informas, *Dana Desa 2016*, PUSDATIN, 2017 hal 106

pembangunan sarana dan prasarana desa, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa. Alokasi dana desa dihasilkan dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

c. Pendapatan Asli Desa sebagai X3

Pendapatan Asli Desa (PADesa) merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan pada hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa.¹³ Penerimaan PADesa berasal dari berbagai usaha yang dilakukan oleh desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dan membiayai segala kegiatan yang ada di desa. PADesa dapat berupa hasil usaha desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, penerimaan tanah kas desa dan lain sebagainya. PADesa adalah faktor yang sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan desa.

d. Indeks Desa Membangun sebagai Y

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah alat untuk mengetahui ukuran perkembangan status kemandirian desa melalui analisis dan komposisi nilai dari setiap indikator individual yang kemudian didasarkan pada kebutuhan, kebijakan pembangunan yang ditetapkan serta otoritas kewenangan, tugas dan fungsi

¹³ Prasetya, *Menumbuhkan Pendapatan Asli Desa Sebuah Harapan dan Tantangan*, (Banjarnegara: Guepedia, 2020), hal 21-23

kementrian desa.¹⁴ IDM diperlukan sebagai acuan mengenai status desa sebagaimana dinyatakan dalam Permendes PDTT No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Hasil analisis IDM tentang status desa dalam menentukan status kemandirian akan berfungsi sebagai alat utama untuk mengintegrasikan penelitian yang sedang berlangsung.

2. Definisi Operasional

Variabel adalah segala sesuatu yang ditentukan oleh peneliti di lapangan dengan bentuk apapun itu untuk dilakukan penelitian terhadapnya sehingga dapat diperoleh informasi yang diinginkan lalu dapat ditarik kesimpulan terhadap pengaruhnya. Dalam penelitian ini dua jenis variabel yang digunakan oleh peneliti yaitu variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Variabel independen adalah variabel bebas yang dapat mempengaruhi variabel lain yaitu variabel dependen. Variabel independen yang akan diteliti pada penelitian ini adalah dana desa (X1), alokasi dana desa (X2), dan Pendapatan Asli Desa (X3). Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel independen yaitu angka Indeks Desa Membangun (Y).

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan ini telah disajikan 6 bab yang akan dibahas, sistematika penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

¹⁴ Kurniawan, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Malang Jawa Timur: Tim MNC Publishing, 2021), hal 27-29

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, batasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan teori, berisi tentang kajian teori yang di dalamnya berisi mengenai penjabaran teori paradigma pembangunan desa, konsep pembangunan ekonomi desa, pengertian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa (PADesa), dan Indeks Desa Membangun yang disertai dengan adanya penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan penelitian, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III Metode penelitian, berisi pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampling teknik pengambilan sampel, data, sumber data, dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian, berisi hasil penelitian dan penemuan penelitian tentang bagaimana pengaruh dari adanya Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Pendapatan Asli Desa (PAD) terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Tulungagung selama tahun yaitu pada periode 2020, 2021, dan 2022.

BAB V Pembahasan penelitian, membahas dan menguraikan hasil dari temuan penelitian tentang bagaimana pengaruh dari adanya Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Pendapatan Asli Desa (PAD) terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten

Tulungagung selama tahun yaitu pada periode 2020, 2021, dan 2022.

BAB VI Penutup, berisi kesimpulan dan saran dari peneliti secara keseluruhan dari hasil penemuan penelitian.